



Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 16 Nomor 2 Nopember 2024

p-ISSN: 1979-6366

e-ISSN: 2502-6550

Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020



KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE *IMMEDIATE OUTCOME (IO)*

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) IN SUPPORTING SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Hendar Sugilar*¹

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Teregistrasi I tanggal: 14 Juni 2024; Diterima setelah perbaikan tanggal: 3 Oktober 2024; Teregistrasi I tanggal: 1 Desember

2023; Diterima setelah perbaikan tanggal: 6 Mei 2024;

Disetujui terbit tanggal: 9 Oktober 2024

ABSTRAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah, termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. DAK sering kali digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antar daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk memberikan stimulus pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas DAK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Metode Immediate Outcome (IO) digunakan dalam studi ini untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK di sektor kelautan dan perikanan. Data dianalisis dari 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas DAK bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022. Hasil menunjukkan bahwa 47,5% daerah berada pada kategori patuh dan mencapai target (optimal), 11,7% patuh namun tidak mencapai target (belum optimal), dan 40,8% tidak patuh. Studi ini menunjukkan beberapa gap, seperti kurangnya analisis kualitatif, variasi konteks lokal, dampak jangka panjang, keterlibatan stakeholder, pengukuran dampak sosial dan ekonomi, serta inovasi dan adaptasi kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan DAK untuk keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan.

Kata Kunci: Monitoring; Evaluasi Efektivitas; Immediate Outcome (IO)

ABSTRACT

The Special Allocation Fund (DAK) aims to finance various development activities in regions, including the marine and fisheries sectors. DAK is often used to enhance public services across regions and reduce income disparities. The effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors is crucial for stimulating regional development and informing policymakers for local economic growth. This study evaluates the effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors. The Immediate Outcome (IO) method is used to monitor and evaluate planning, budgeting, and implementation policies of DAK in these sectors. Data were analyzed from 24 provinces and 150 districts/cities prioritized for DAK in the Marine and Fisheries sectors for the 2022 fiscal year. Results indicate that 47.5% of the regions were compliant and achieved their targets (optimal), 11.7% were compliant but did not meet their targets (suboptimal), and 40.8% were non-compliant. These findings provide valuable insights for policymakers to optimize the use of DAK for sustainable development in the marine and fisheries sectors.

Keywords: Monitoring; Effectiveness Evaluation; Immediate Outcome (IO)

Korespondensi penulis:

e-mail: hendarsugilar@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.145-158>

Copyright © 2024, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu meningkatnya seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun, implementasi tujuan ini menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan lokal dan fokus pada kebutuhan individu daripada pengembangan masyarakat (Setiawan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Fatimatuzzahroh, 2021). Hal ini dapat dicapai melalui penerapan strategi pembangunan nasional yang memprioritaskan partisipasi berbagai sektor, termasuk sektor perikanan dan kelautan (Wibowo, 2008).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan sektor perikanan dan kelautan memainkan peran penting (Setiawan, 2023). Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki luas wilayah laut yang sangat luas sehingga dianugerahi sumber daya perikanan yang melimpah. Tidak mengherankan bila sejak berabad-abad laut dan ikan telah menjadi sumber penyediaan bahan pangan protein serta lapangan kerja.. Teracatat pada tahun 2021, sektor kelautan dan perikanan merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor perikanan menyumbang sekitar 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai mencapai Rp 150 triliun, dan menyerap sekitar 7 juta tenaga kerja di bidang penangkapan dan budidaya ikan (BPS, 2021; KKP, 2021).

Ekspor produk perikanan juga mencatat kinerja positif dengan nilai USD 5,2 miliar pada tahun yang sama (BPS, 2021). Selain itu, sektor ini berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Konsumsi ikan per kapita di Indonesia terus meningkat, mencapai sekitar 54 kg per tahun pada 2021, menunjukkan pentingnya sektor ini sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat (KKP, 2021). Namun, sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan seperti *overfishing*, degradasi lingkungan laut, perubahan iklim, dan praktik perikanan ilegal (World Bank, 2020). Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat, termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di sektor ini.

Pentingnya sektor kelautan dan perikanan (KP) dalam pembangunan nasional dibuktikan dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk

sektor ini (Ramaditya, 2015). Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan dalam kerangka otonomi daerah (Abdurohman, 2014). Untuk mempercepat pembangunan sektor KP di daerah, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KP, yang sejalan dengan konsep pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, DAK merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK memberikan dampak positif, sebagai contoh dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pesisir dan Kelautan (PNPM-MKP) terhadap pendapatan masyarakat nelayan telah diteliti dengan hasil yang positif (Nodi *et al.*, 2014).

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi dampak kebijakan fiskal dan dana alokasi khusus terhadap kesenjangan infrastruktur. Sebagai contoh Fuente dan Vives (1995) menemukan bahwa meskipun investasi publik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, dampaknya bergantung pada volume dan alokasi regional. Khusaini *et al.* (2023) dan Qomariyah *et al.* (2016) menyoroti peran penting dana alokasi khusus dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, terutama ketika dialokasikan untuk infrastruktur dan sektor primer. Namun, Akita *et al.* (2020) mencatat bahwa ketimpangan fiskal di Indonesia masih tinggi, sehingga perlu adanya formula alokasi yang lebih efektif dan perluasan dana alokasi khusus untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa DAK merupakan instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas belanja pemerintah.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan kompleks dan memiliki beragam dimensi (Schut *et al.*, 2014b). Selain itu, terdapat interaksi silang di level yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tepat (Giller *et al.*, 2008). Salah satu permasalahan yang patut diberi perhatian adalah disparitas infrastruktur perikanan antara Jawa dan luar Jawa yang harus dikurangi. Infrastruktur atau menu pembangunan fisik untuk sektor perikanan berupa sarana pokok seperti pelabihan perikanan, cold storage, pabrik es dan penyediaan bahan bakar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika infrastruktur merata dan berhasil dilaksanakan pada wilayah terluar dan tertinggal, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing, dan mengurangi biaya logistik dalam

negeri yang selama ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui DAK khusus Fisik (DAK Fisik) yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan DAK Non Fisik peruntukkannya untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan.

Dengan beragam dan kompleksnya permasalahan tersebut, maka arah kebijakan DAK Fisik bidang KP

diharapkan tidak melenceng dari program pembangunan nasional. DAK Fisik bidang KP sebagai contoh berupa pengadaan perahu atau kapal penangkapan ikan beserta mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang peruntukkannya sudah sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran. Forum *Multilateral Meeting* (MM) perlu dilakukan untuk menentukan program/kegiatan yang menjadi skala prioritas. Forum *Multilateral Meeting* tersebut menghasilkan menu dan target DAK fisik bidang KP yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Menu dan Target DAK Fisik bidang Kelautan dan Perikanan TA 2022 (*Multilateral Meeting*, 2022)
Table. 1. *Menu and Targets for Physical DAK for Maritime Affairs and Fisheries for FY 2022 (Multilateral Meeting, 2022)*

NO	MENU
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan*
2	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)*
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi*
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat*
5	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)#
6	Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil#
7	Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil#
8	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (Kab/Kota)#

Keterangan: * = Menu DAK wewenang Pemerintah Provinsi; # = Menu DAK Wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pembangunan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan bersifat dinamis sehingga dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan agar program-program yang disusun dapat selalu memberi dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, sesuai siklus manajemen mutu *Plan, Do, Check, Act* (PDCA), monitoring dan evaluasi (monev) menjadi tahapan yang harus dilakukan. Pada pelaksanaannya, implementasi DAK oleh pemerintah daerah ini menghadapi berbagai macam tantangan dalam memenuhi tuntutan realisasi anggaran dan refocusing kegiatan yang terdiri dari waktu yang singkat dan terbatasnya sumber daya, tidak ada standar khusus realisasi anggaran dan refocusing kegiatan (Hardiana, 2023)

Monev merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi program/kegiatan, progress yang dicapai pada program/kegiatan tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya program/kegiatan tersebut (Ojha, 1998). Di dalam siklus kebijakan publik, monev merupakan salah satu tahapan kegiatan (fase) yang dapat memberikan informasi mengenai mutu yang dihasilkan (*output*) dari

suatu proses implementasi, manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran (*outcome*), serta dampak perubahan (*impact*) yang terjadi di masyarakat akibat adanya kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Secara konseptual, monitoring diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah penyesuaian atau perbaikan. Sementara evaluasi adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data/informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan menggunakan kriteria keberhasilan tertentu guna keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya dari aspek *input*, dan *output*, tetapi juga manfaat (*outcome*) yang dirasakan oleh kelompok sasaran, dan dampak perubahan (*impact*) pada beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Pentingnya Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kelautan dan perikanan tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Sebagai

negara kepulauan terbesar, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, DAK di bidang ini sangat strategis dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. DAK bidang kelautan dan perikanan dirancang sebagai salah satu program pembangunan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, untuk memastikan bahwa DAK benar-benar efektif dan tepat sasaran, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai proses perencanaan dan implementasinya. Penelitian ini menghadirkan novelty dengan menggunakan pendekatan perencanaan dalam membangun kebijakan publik yang spesifik di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan.

untuk menilai sejauh mana program pembangunan kelautan yang sudah dilaksanakan berhasil mencapai target berdasarkan menu/submenu yang telah disusun dalam Rencana Kegiatan (RK). Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkap sejauh mana program pembangunan yang didanai DAK di bidang kelautan dan perikanan pada Tahun Anggaran 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari studi ini adalah mengetahui sejauh mana program pembangunan kelautan dan perikanan bidang kelautan dan perikanan TA 2022 yang didanai DAK memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi semua pihak terkait manfaat yang dihasilkan dari program pembangunan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE ANALISIS

Mengukur efektivitas DAK memerlukan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) jangka menengah

Kajian efektivitas DAK bidang KP ini menggunakan instrument *Immediate Outcome* dengan *logical framework* sebagai berikut:

Tabel 3. *Logical Framework Immediate Outcome (IO) DAK bidang kelautan dan perikanan*
 Table 3. *Logical Framework Immediate Outcome (IO) DAK in the maritime and fisheries sector*

Menu	Immediate Outcome	Indikator Capaian	Target*	Satuan	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan sesuai standar	Rata-rata Jumlah nelayan / stakeholder di Pelabuhan Perikanan penerima manfaat dari peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Minimal 200 nelayan atau stakeholder di Pelabuhan Perikanan per bulan	Nelayan atau stakeholder (orang)	Nelayan/ stakeholder di Pelabuhan Perikanan	Rekapitulasi Rata-rata jumlah nelayan atau stakeholder di pelabuhan perikanan per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni 2024)
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPTD Provinsi)	Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	Minimal 75 ribu ekor benih/ UPTD Provinsi/ bulan	Benih ikan (ekor)	Pembudidaya Ikan/ Kelompok pembudidaya ikan	Rekapitulasi Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh UPTD Provinsi per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni 2024)
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi	Peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah rata-rata hari operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Minimal 10 - 15 hari operasi pengawasan pada triwulan 1	Hari Operasi Pengawasan	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan masyarakat pesisir	Jumlah realisasi hari operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggunakan speedboat pengawasan pada triwulan I tahun berikutnya (T+1)

		Persentase Pokmaswas/ Polsus PWP3K / Pengawas Perikanan penerima perlengkapan yang aktif dalam mendukung pengawasan	Minimal 85%	Persen (%)	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan masyarakat pesisir	Jumlah Pokmaswas/ Polsus PWP3K / Pengawas Perikanan penerima yang aktif dibagi Jumlah Pokmaswas /Polsus PWP3K / Pengawas Perikanan penerima (persentase)
	Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Persentase peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	meningkat 5%	Persen (%)	SKPD terkait kelautan dan perikanan, dan masyarakat pesisir	Persentase nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun berjalan (T) dikurangi dengan persentase nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun sebelumnya (T-1), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat	Peningkatan ketersediaan sarana produksi dan prasarana niaga garam	Jumlah petambak garam rakyat per kelompok petambak garam rakyat penerima manfaat dari peningkatan sarana prasarana garam rakyat	10 orang perkelompok petambak garam rakyat	Petambak garam (orang)	Petambak garam	Jumlah petambak garam perkelompok
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPTD Kab/Kota)	Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh Unit Perbenihan (UPTD kab/kota)	Minimal 40 ribu ekor benih/UPTD kab/kota/bulan	Benih ikan (ekor)	Pembudidaya Ikan/ Kelompok pembudidaya ikan	Rekapitulasi Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh UPTD kab/kota per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni 2024)
Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kapal perikanan, mesin, alat tangkap dan sarana	Jumlah nelayan per koperasi atau KUB Perikanan Tangkap penerima manfaat dari peningkatan sarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	5-10 orang per koperasi atau KUB perikanan tangkap	Nelayan (orang)	Nelayan/Kelompok nelayan/ koperasi/KUB Perikanan Tangkap	Rekapitulasi jumlah nelayan dan jumlah koperasi/KUB perikanan tangkap yang menerima bantuan

Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kapal perikanan, mesin, alat tangkap dan sarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil lainnya oleh nelayan	Jumlah nelayan per koperasi atau KUB Perikanan Tangkap penerima manfaat dari peningkatan sarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	5-10 orang per koperasi atau KUB perikanan tangkap	Nelayan (orang)	Nelayan/Kelompok nelayan/ Koperasi/KUB Perikanan Tangkap	Rekapitulasi jumlah nelayan dan jumlah koperasi/KUB perikanan tangkap yang menerima bantuan
	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan prasarana pemberdayaan usaha nelayan ikan skala kecil (TPI dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan)	Rata-rata Jumlah nelayan / <i>stakeholder</i> penerima manfaat dari peningkatan prasarana pemberdayaan usaha nelayan ikan skala kecil (TPI dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Produktivitas Nelayan)	Minimal 50 nelayan atau <i>stakeholder</i>	Nelayan atau <i>stakeholder</i> (orang)	Nelayan/ Kelompok nelayan/ Koperasi/KUB Perikanan Tangkap	Rekapitulasi Rata-rata jumlah nelayan atau <i>stakeholder</i> penerima manfaat dari peningkatan prasarana pemberdayaan usaha nelayan ikan skala kecil (TPI dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan) (periode Januari-minggu ke-2 Juni 2024)
Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil	Jumlah pembudidayaan ikan per kelompok pembudidayaan ikan penerima manfaat dari peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan skala kecil	Minimal 10 orang per kelompok pembudidayaan ikan	Pembudidayaan Ikan (orang)	Pembudidayaan Ikan/ Kelompok pembudidayaan ikan	Rekapitulasi jumlah pembudidayaan ikan dan jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang menerima manfaat peningkatan sarana dan prasarana
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan oleh pengolah, pemasar dan <i>stakeholder</i> lain	Jumlah pengolah per kelompok dan <i>stakeholder</i> lain (orang) penerima manfaat dari Bedah UPI	Minimal 5 orang per kelompok pengolah untuk bedah UPI	Jumlah Pengolah Per Kelompok (orang)	Pengolah/ Kelompok pengolah hasil perikanan	Rekapitulasi Jumlah Pengolah dan <i>stakeholder</i> lain yang dilayani (orang)
		Jumlah pengolah dan pemasar per kelompok dan <i>stakeholder</i> lain (orang) penerima manfaat dari <i>Integrated Cold Storage, Cold Storage/ Cold Storage Portable, Pabrik Es/Ice Flake Machine, Pasar Ikan, Sentra Pengolahan, dan Gudang Rumput Laut</i>	Minimal 15 orang pengolah dan atau pemasar dan <i>stakeholder</i> lainnya untuk <i>Integrated Cold Storage, Cold Storage/ Cold Storage Portable, Pabrik Es/Ice</i>	Jumlah Pengolah dan atau pemasar dan <i>stakeholder</i> lainnya (orang)	Pengolah/ Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Rekapitulasi Jumlah Pengolah dan atau Pemasar dan <i>stakeholder</i> lain yang dilayani (orang)

		Jumlah pengolah dan pemasar per kelompok dan stakeholder lain (orang) penerima manfaat dari <i>Integrated Cold Storage, Cold Storage/ Cold Storage Portable, Pabrik Es/ Ice Flake Machine</i> , Pasar Ikan, Sentra Pengolahan, dan Gudang Rumput Laut	Minimal 15 orang pengolah dan atau pemasar dan stakeholder lainnya untuk <i>Integrated Cold Storage, Cold Storage/ Cold Storage Portable, Pabrik Es/ Ice Flake Machine</i> , Pasar Ikan, Sentra Pengolahan, dan Gudang Rumput Laut	Jumlah Pengolah dan atau pemasar dan stakeholder lainnya (orang)	Pengolah/ Pemasar/ Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Rekapitulasi Jumlah Pengolah dan atau Pemasar dan stakeholder lain yang dilayani (orang)
--	--	---	--	--	--	--

Logical framework tersebut disusun dengan berdasarkan pada tiga pertanyaan dasar dalam merancang sistem monitoring dan evaluasi yang baik dan mampu terimplementasikan, yaitu:

1. *What*, yakni apa yang akan dimonitor dan dievaluasi
2. *How*, yakni metode dan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi dan membangun indikator
3. *Who*, yakni pihak yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, baik itu internal maupun eksternal, institusi yang akan dilibatkan, dan sebagainya (Ojha, 1998)

Selanjutnya dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan identifikasi efektivitas berbagai menu kegiatan DAK fisik Bidang KP. Adapun variabel tingkat efektivitas DAK fisik yang digunakan adalah pelaporan serta tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 3. Tingkat efektivitas dikelompokkan menjadi 3

Tabel 4. Kriteria kepatuhan dan keefektifan
Table 4. Compliance and effectiveness criteria

Nilai	Kriteria
> 80%	Sangat baik
60 – 79%	Baik
40 – 59%	Cukup baik
20 – 39%	Tidak baik
< 20%	Sangat tidak baik

yaitu:

1. Optimal dengan kriteria melapor/ patuh dan target tercapai
2. Belum optimal dengan kriteria melapor/ patuh tetapi target tidak tercapai
3. Tidak melapor/ tidak patuh.

Kajian efektivitas dilakukan pada 24 Provinsi dan 150 Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi prioritas DAK bidang kelautan dan perikanan TA 2022 (*dokumen Multilateral Meeting (MM) TA 2022*). Secara total terdapat 174 daerah baik provinsi maupun kab./ kota yang mendapatkan alokasi DAK bidang KP pada TA 2022. Adapun sumber data pelaporan diperoleh dari aplikasi Krisna (<https://krisna.systems/renjaki/2024/home-jumper>).

Kriteria efektifitas dan kepatuhan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan di internal organisasi yaitu:

BAHASAN

Pembahasan tingkat efektivitas DAK bidang KP dibagi menjadi dua kelompok besar daerah (provinsi maupun Kab/ Kota), yaitu (1) kelompok daerah yang menyampaikan laporan (patuh), dan (2) kelompok daerah yang tidak menyampaikan laporan (tidak patuh). Selanjutnya, untuk daerah yang patuh pun dibagi lagi menjadi mencapai target dan tidak

mencapai target. Tingkat efektivitas DAK Bidang KP kemudian ditentukan dengan menggunakan kombinasi dari kedua variabel tersebut. Deskripsi tingkat efektivitas per masing-masing menu DAK Bidang KP berdasarkan data yang diperoleh, ditampilkan sebagai berikut:

1. DAK bidang KP kewenangan provinsi
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Tabel 5. Review IO DAK Menu Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 Table 5. Review of IO DAK Menu Development/Rehabilitation of Fishing Port Facilities and Infrastructure
 satuan: provinsi

Hasil review IO 2022			
Status		Sesuai di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	7	-	-
Lapor	16	10	6
Total	23	10	6

Pada menu ini, dari 23 provinsi yang memperoleh DAK, terdapat 10 provinsi berada pada kategori optimal atau 43,5%. Sementara provinsi yang belum optimal sebanyak 6 atau 26,1% dan yang tidak melapor sebanyak 7 provinsi atau 30,4%. Dengan

demikian tingkat efektivitas DAK menu ini cukup baik karena nilainya berada di antara 40 - 59%

- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)

Tabel 6. Review IO DAK Menu Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 Table 6. Review of IO DAK Seed Unit Development/Rehabilitation Menu (Provincial UPTD)
 satuan: provinsi

Hasil review IO 2022			
Status		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	7		
Lapor	14	2	12
Total	21	2	12

Pada menu ini, dari 21 provinsi yang memperoleh DAK, hanya 2 provinsi berada pada kategori optimal atau 9,5%. Sementara provinsi yang belum optimal sebanyak 6 atau 57,1% dan yang tidak melapor sebanyak 7 provinsi atau 33,3%. Dengan demikian

tingkat efektivitas DAK menu ini masih sangat tidak baik karena nilainya di bawah 20%.

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi

Tabel 7. Review IO DAK Menu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi
 Table 7. Review of IO DAK Menu Procurement of Facilities and Infrastructure for Monitoring and Provincial Conservation Areas
 satuan: provinsi

Hasil review IO 2022			
Status		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	6		
Lapor	12	8	4
Total	18	8	4

Pada menu ini, dari 18 provinsi yang memperoleh DAK, 8 provinsi berada pada kategori optimal atau 44,4%. Sementara provinsi yang belum optimal sebanyak 4 atau 22,2% dan yang tidak melapor sebanyak 6 provinsi atau 33,3%. Dengan demikian

tingkat efektivitas DAK menu ini masih belum efektif karena nilainya cukup baik karena nilainya berada di antara 40 - 59%.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

Tabel 8. Review IO DAK Menu Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

Table 8. Review of IO DAK Menu Procurement of Facilities and Infrastructure for People's Salt

satuan: provinsi

Status	Hasil review IO 2022		
		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	7		
Lapor	5	1	4
Total	12	1	4

Pada menu ini, dari 12 provinsi yang memperoleh DAK, hanya 1 provinsi berada pada kategori optimal atau 8,3%. Sementara provinsi yang belum optimal sebanyak 4 atau 33,3% dan yang tidak melapor sebanyak 7 provinsi atau 58,3%. Dengan demikian

tingkat efektivitas DAK menu ini masih sangat tidak baik karena nilainya di bawah 20%.

Bila ditotal, DAK bidang KP yang merupakan kewenangan provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Review IO DAK Menu Kewenangan Provinsi

Table 9. Review of IO DAK Provincial Authority Menu

satuan: provinsi

Status	Hasil review IO 2022		
		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	27	0	0
Lapor	47	21	26
Total	74	21	26

Secara ringkas, untuk DAK yang merupakan kewenangan provinsi, dari 74 DAK yang dialokasikan, hanya 21 yang berada pada kategori optimal atau 28,4%. Sementara yang belum optimal sebanyak 26 atau 35,1% dan yang tidak melapor sebanyak 27 atau 36,5%. Dengan demikian tingkat efektivitas DAK yang menjadi kewenangan provinsi masih tidak baik karena nilainya berada di antara 20 – 39%. Sementara untuk

tingkat kepatuhan, penerima DAK yang menyampaikan laporan sebanyak 47 atau 63,5%, berada dalam kategori baik.

2. DAK bidang KP kewenangan Kab/ Kota
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Tabel 10. Review IO DAK Menu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Table 10. Review of IO DAK Menu Procurement of Facilities and Infrastructure for Empowering Small-Scale Fishermen's Businesses

satuan: kabupaten

Status	Hasil review IO 2022		
		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	75	0	0
Lapor	130	130	0
Total	205	130	0

Pada menu ini, dari 205 Kab/ Kota yang memperoleh DAK, 130 Kab/ Kota berada pada kategori optimal atau 63,4%. Keseluruhan Kab/ Kota yang melapor mencapai target sehingga tidak ada daerah yang belum optimal. Sementara Kab/ Kota

yang tidak melapor sebanyak 75 atau 36,6% Dengan demikian tingkat efektivitas DAK menu ini sudah baik karena nilainya berada di antar 60 – 79%.

b. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)

Tabel 11. Review IO DAK Menu Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)

Table 11. Review of IO DAK Menu Development/Rehabilitation of Seed Units (UPTD District/City)

satuan: kabupaten

Hasil review IO 2022			
Status		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	67	0	0
Lapor	53	0	53
Total	120	0	53

Pada menu ini, dari 120 Kab/ Kota yang memperoleh DAK, tidak ada Kab/ Kota yang berada pada kategori optimal. Sementara Kab/ Kota belum optimal sebanyak 53 atau 44,2% dan yang tidak melapor sebanyak 67 atau 55,8% Dengan demikian

tingkat efektivitas DAK menu ini masih sangat tidak baik karena nilainya berada di bawah 20%.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Tabel 12. Review IO DAK Menu Pengadaan Sarana dan Prasarana PemberdayaaUsaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Table 12. Review of IO DAK Menu Procurement of Facilities and Infrastructure for Empowering Small-Scale Fish Farming Businesses

satuan: kabupaten

Hasil review IO 2022			
Status		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	68	0	0
Lapor	130	127	3
Total	198	127	3

Pada menu ini, dari 198 Kab/ Kota yang memperoleh DAK, 127 Kab/ Kota berada pada kategori optimal atau 64,1%. Sementara Kab/ Kota yang belum optimal sebanyak 3 atau 1,5% dan yang tidak melapor sebanyak 68 provinsi atau 34,3%.

Dengan demikian tingkat efektivitas DAK menu ini sudah baik karena nilainya berada di antara 60 - 79%

d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Tabel 13. Review IO DAK Menu Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Table 13. Review of IO DAK Menu Rehabilitation of Facilities and Infrastructure Fishery Product Processing

satuan: kabupaten

Hasil review IO 2022			
Status		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	70	0	0
Lapor	85	79	6
Total	155	79	6

Pada menu ini, dari 155 Kab/ Kota yang memperoleh DAK, 79 Kab/ Kota berada pada kategori optimal atau 50,9%. Sementara Kab/ Kota yang belum optimal sebanyak 6 atau 3,9% dan yang tidak melapor sebanyak 70 provinsi atau 45,2%. Dengan

demikian tingkat efektivitas DAK menu ini cukup baik karena nilainya berada di antara 40-59%

Bila ditotal, DAK bidang KP yang merupakan kewenangan Kab/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Review IO DAK Menu Kewenangan Kab./ Kota
Table 14. Review of IO DAK District/City Authority Menu

satuan: kabupaten

Status	Hasil review IO 2022		
		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	280	0	0
Lapor	398	336	62
Total	678	336	62

Untuk DAK yang merupakan kewenangan Kab./ Kota, dari 678 DAK yang dialokasikan, 336 berada pada kategori optimal atau 49,5%. Sementara yang belum optimal sebanyak 62 atau 9,1% dan yang tidak melapor sebanyak 280 penerima atau 41,3%. Dengan demikian tingkat efektivitas DAK bidang KP kewenangan kab./ kota cukup baik karena nilainya

berada di antara 40-59%. Sementara untuk tingkat kepatuhan, penerima DAK yang menyampaikan laporan sebanyak 398 atau 58,7%, berada di kategori cukup baik Selanjutnya, apabila direkapitulasi, keseluruhan DAK bidang KP pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Review IO DAK Menu Bidang KP
Table 15. Review of IO DAK KP Field Menu

Status	Hasil review IO 2022		
		sesuai-di atas target	di bawah target
Tidak Lapor	307	0	0
Lapor	445	357	88
Total	752	357	88

Berdasarkan tabel di atas, dari 752 DAK yang dialokasikan, 357 berada pada kategori optimal atau 47,5%. Sementara yang belum optimal sebanyak 88 atau 11,7% dan yang tidak melapor sebanyak 307 atau 40,8%. Dengan demikian secara keseluruhan tingkat efektivitas DAK bidang KP cukup baik karena nilainya masih berada di antara 40 - 59%. Lebih lanjut, bila melihat tingkat kepatuhan, dari 752 DAK yang dialokasikan, 445 atau 59,2% berada dalam kategori patuh, atau masuk dalam kategori cukup baik.

performa yang baik walaupun Papua Barat yang juga berada di wilayah Timur menunjukkan performa yang buruk. Begitu juga untuk daerah barat di mana Aceh dan Jawa Tengah menunjukkan performa yang baik sementara Lampung menunjukkan sebaliknya.

Hal yang sama juga terlihat pada alokasi DAK yang diterima oleh suatu daerah. Tingkat kepatuhan serta kualitas pelaporan tidak terlihat dari besar atau sedikitnya alokasi DAK yang diterima oleh suatu daerah. Hal ini terlihat dari ada daerah yang alokasi dananya besar namun tetap patuh dalam memberikan laporan dan kualitas laporannya pun baik seperti Maluku dan Jawa Tengah pada DAK kewenangan provinsi serta Kab. Buton Selatan dan Kab. Kep. Talaud pada DAK kewenangan Kabupaten dan Kota.

Namun demikian, tidak terlihat adanya hubungan antara lokasi DAK dengan tingkat kepatuhan pelaporan DAK maupun kualitas laporannya. Apabila lokasi DAK dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Barat (Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan), Tengah (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi), dan Timur (Kepulauan Maluku dan Pulau Papua), tidak terdapat pola yang tertentu dalam tingkat kepatuhan penerima DAK dalam menyampaikan laporan monitoringnya serta kualitas laporannya. Lokasi yang berada di timur seperti Maluku dan Maluku utara menunjukkan

Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan review Immediate Outcome berdasarkan kepatuhan belum dapat memberikan gambaran secara utuh terkait informasi kualitatif yang memadai untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai

fenomena yang terjadi terkait tingkat kepatuhan penerima DAK dalam menyampaikan laporan monitoring. Variasi konteks lokal di masing-masing wilayah penerima DAK, seperti yang dibagi menjadi Barat, Tengah, dan Timur, tidak menunjukkan pola yang konsisten. Misalnya, wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara menunjukkan performa yang baik, sementara Papua Barat menunjukkan performa yang buruk. Hal serupa juga terlihat di wilayah Barat, di mana Aceh dan Jawa Tengah menunjukkan performa yang baik, sementara Lampung sebaliknya. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa besar atau kecilnya alokasi DAK tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan. Contohnya, daerah dengan alokasi dana besar seperti Maluku dan Jawa Tengah tetap menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait variabel-variabel lain yang dapat menjadi penentu suatu daerah patuh atau tidak dalam menyampaikan laporan monitoring DAK nya. Beberapa data yang diperlukan antara lain *track record* daerah dalam menyampaikan laporan selama 3 tahun terakhir. Selain itu, kooperatif atau tidaknya suatu daerah mungkin bisa juga dilihat dari keaktifannya dalam proses pengalokasian DAK mulai dari sosialisasi, asistensi, dan koordinasi-koordinasi lainnya.

Kasus di mana banyak daerah tidak melaporkan pada saat review immediate outcome terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah mengenai prosedur pelaporan dan pentingnya pelaporan tersebut. Sosialisasi dan pelatihan yang kurang memadai berkontribusi pada ketidaktahuan ini. Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi hambatan signifikan. Jika prosedurnya terlalu kompleks, petugas di daerah mungkin kesulitan menyelesaikan pelaporan tepat waktu. Faktor lain adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia yang terlatih maupun teknologi, yang membuat pelaporan menjadi tantangan. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam pelaporan (Bappenas, 2023).

Masalah teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil atau sistem pelaporan online yang tidak berfungsi dengan baik, juga sering menjadi penghalang. Beberapa daerah mungkin lebih fokus pada pencapaian hasil akhir daripada pelaporan immediate outcome, yang dianggap sebagai tugas

administratif tambahan. Insentif dan pengawasan yang kurang memadai juga dapat menyebabkan daerah kurang termotivasi untuk melakukan pelaporan sesuai jadwal. Selain itu, kekhawatiran bahwa pelaporan mungkin mengungkapkan penggunaan dana yang tidak sesuai atau inefisiensi lainnya dapat membuat beberapa daerah ragu untuk melaporkan dengan segera.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap DAK bidang KP TA 2022 di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan penerima DAK bidang KP TA 2022 berada pada tingkat cukup baik yaitu 59,2%, dimana menu DAK yang memiliki kepatuhan tinggi adalah menu DAK yang merupakan kewenangan provinsi yaitu 63,5% berbanding tingkat kepatuhan 58,7% pada DAK yang merupakan kewenangan kab./ kota.
2. Secara keseluruhan efektivitas DAK bidang KP TA 2022 masih berada pada level yang cukup baik yaitu 40,8%, dimana DAK bidang KP kewenangan provinsi memiliki tingkat efektivitas 28,4% dan tingkat efektivitas DAK bidang KP kewenangan kab/ kota yang memiliki tingkat efektivitas 49,5%.
3. Variasi konteks lokal di wilayah-wilayah penerima DAK, seperti Barat, Tengah, dan Timur, tidak menunjukkan pola konsisten, dengan beberapa wilayah seperti Maluku dan Maluku Utara menunjukkan performa baik, sementara Papua Barat menunjukkan performa buruk. Selain itu, besar kecilnya alokasi DAK tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan, contohnya daerah seperti Maluku dan Jawa Tengah tetap menunjukkan kepatuhan yang tinggi meskipun menerima alokasi dana besar.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan dukungan pemahaman Immediate Outcome kepada daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) penerima DAK bidang KP tentang tata cara pengisian/penguasaan materi *Immediate Outcome*, target di masing-masing menu/submenu, dan ketepatan dalam menyampaikan laporan *Immediate Outcome*
2. Kunjungan Lapangan (*site visit*) untuk memvalidasi hasil capaian *Immediate Outcome* yang telah disampaikan oleh daerah melalui Aplikasi Krisna

DAK dan penelaahan pada masing-masing menu terhadap capaian IO untuk mengevaluasi Menu pada DAK tahun selanjutnya

3. *Re-design target Immediate Outcome* pada masing-masing menu/sub menu agar lebih terukur dengan menjadikan *Immediate Outcome* sebagai indikator target pada DAK bidang kelautan dan perikanan
4. Peningkatan partisipasi daerah dalam pelaporan *Immediate Outcome* pada Aplikasi Krisna DAK, dengan penyadaran, antara lain: penumbuhan pemahaman terhadap pentingnya Immediate Outcome untuk keberlanjutan program/kegiatan di masing-masing daerah, menciptakan komitmen kebersamaan untuk peningkatan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan yang didanai dari DAK Capaian indikator Immediate Outcome dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK dan selanjutnya dapat diusulkan untuk pengalokasian DAK pada tahun berikutnya.
5. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui variabel-variabel yang menyebabkan suatu daerah tidak patuh dalam menyampaikan laporan monitoring DAK nya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi, menyederhanakan prosedur pelaporan, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta memperbaiki sistem teknis. Insentif yang memadai juga perlu diberikan untuk mendorong pelaporan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Biro Perencanaan KKP dan masing-masing Eselon 1 yang membidangi menu/submenu pada DAK Fisik.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Biro Perencanaan, Unit Kerja Eselon 1 lingkup KKP (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSKP dan Ditjen PRL) serta Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pembangunan Daerah, Direktorat Pendanaan pembangunan) sebagai Kementerian/Lembaga yang telah memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan motivasi kepada penulis untuk mengerjakan studi ini sebaik-baiknya. Selain itu, terima kasih juga penulis tujukan kepada semua narasumber, yaitu Pemerintah Daerah yang merupakan lokasi prioritas DAK bidang kelautan dan perikanan TA 2022 yang telah menyampaikan laporan *Immediate Outcome* sebagai bagian dari *planning, budgeting* dan monitoring yang tidak terpisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. A. (2014). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (Studi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Kpp-Sb Di Daerah Miskin). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 11(2), 245-260. <https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.40>
- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues?. *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842-1866. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Badan Pusat Statistik. (2021). "*Ekspor Produk Perikanan 2021*". Jakarta: BPS.
- Dokumen Multilateral Meeting (MM) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan TA 2022.
- Fatimatuzzahroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat dan analisis aktor pada rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 257-269. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9420>
- Fuente, A. D. L., & Vives, X. (1995). Infrastructure and education as instruments of regional policy: evidence from Spain. *Economic policy*, 10(20), 11-51. <https://doi.org/10.2307/1344537>
- Giller, K.E., Leeuwis, C., Andersson, J.A., Andriessse, W., Brouwer, A., & Frost, P. (2008). Competing claims on natural resources: what role for science. *Eol. Soc.* 13,34. Available from: <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss32/art34/>; [online]. <http://www.jstor.org/stable/26267992>
- Hardiana, D. R. (2023). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 321-338. DOI: 10.25077/jakp.9.1.185-202.2024
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). "*Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikanan*". Jakarta: KKP.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). "Konsumsi Ikan Per Kapita 2021". Jakarta: KKP.
- Khusaini, K., Mardisentosa, B., & Putro, T. R. (2023). Fiscal Transfer Policies and Road Infrastructure Reduce Income Inequality in Rural-Urban Areas. *ETIKONOMI*, 22(2), 333-356. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.28618>.
- Nodi, M., Mas Roro, L. E., & Agus, S. (2014). Evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan (PNPM Mandiri KP) mengenai pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) di desa prambangan kec. kebomas kabupaten Gresik. <http://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/handle/dx/834>
- Ojha, Durga. (1998). Impact Monitoring Approaches and Indicators. GTZ: *Escborn Panduan ANSSP Volume 6-Monitoring dan Evaluasi*. <https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-evaluation-report-2022.pdf>
- Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2016). Dampak Transfer Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 45-67.
- Ramaditya, R. D. R. (2015). Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Pelayanan perpendaharaan Negara (Kppn) Surabaya li (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Schut, M., van Paassen, A., Leeuwis, C., Klerkx, L. (2014b). Towards dynamic research configurations: a framework for reflection on the contribution of research to policy and innovation processes. *Sci. Public Policy* 41, 207–218.
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1), 48-58. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Badan Pusat Statistik. (2021). "Produk Domestik Bruto Indonesia 2021". Jakarta: BPS.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(1, 48 - 58. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390/348>
- World Bank. (2020). "Marine and Fisheries in Indonesia: Challenges and Opportunities". Washington D.C.: World Bank.